

# Politik Kekerasan (Para Jagoan) dan Dendam di Bali (Beberapa Catatan Lapangan)<sup>1</sup>

I Ngurah Suryawan<sup>2</sup>

“Apa salah keluarga kami. Dulu sudah tempat tinggal semua dibakar. Sekarang kok lagi, Putu dan Ketut dibunuh, apa maksudnya ini. Kalau alasan Pemilu dipakai, itu masih jauh. Saya tidak terima ini,”

(Sila Antara, saudara Putu Negara dan Ketut Agustana saat mengetahui kedua saudaranya terbunuh pada tragedi “Buleleng Berdarah” 26 Oktober 2003 di Kabupaten Buleleng, Bali)

\*\*\*

“*Ngengken biin meluasang suba tawang jelmene to to deen,*”

*Tidak perlu lagi bertanya kepada dukun/orang pintar, saya sudah tahu (yang membunuh anak saya) orangnya itu-itu saja,*”

(Nyoman Dangin, ayah Putu Negara dan Ketut Agustana)

## Pengantar

Nyoman Dangin tertunduk lesu. Raut mukanya memerah, tetes air mata perlahan keluar membasahi mukanya. Sama sekali tidak ada dalam mimpinya, kedua anaknya, Putu Negara dan Ketut Agustana terkapar beku dengan darah segar yang terus mengucur dari perutnya. Kedua anaknya baru saja menjadi korban kejahatan anak manusia, sesama saudara satu *banjar*, komunitas adat di Bali. Di suatu siang hari minggu, 26 Oktober 2003. Nyoman Dangin pasti tidak akan melupakannya, sampai ajal menjemput.

---

[Paper dalam Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia, Universitas Indonesia (UI), 12-15 Juli 2005]

<sup>1</sup> Hasil *fieldwork* kecil tentang kiprah para jagoan/preman di Bali. Saya mulai melakukannya pada Maret 2003. Riset independen ini sempat putus sambung dan hanya menghasilkan beberapa artikel. Sebagian telah dipublikasikan pada *chapter VI Para Militer dan Jagoan (Preman)* dalam buku *Bali, Narasi dalam Kuasa (Politik dan Kekerasan di Bali)*, April 2005. Sebagian besar bahan di paper ini berasal dari buku itu, ditambah dengan riset lanjutan dari November 2004 hingga Maret 2005.

<sup>2</sup> Mahasiswa Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana, Bali. Dari April hingga September 2005 menjadi *visiting fellows* di PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik) Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan menulis hasil penelitian, *Ladang Hitam di Pulau Dewa (Jejak-jejak Pembantaian Massal PKI 1965-1966 di Bali)*. Melakukan riset independen *Geneologi Politik Para Jagoan di Bali*. Bukunya, *Jejak-jejak Manusia Merah (Siasat Politik Kebudayaan Bali)* akan segera terbit. Bisa dihubungi di: [suryawan2001@yahoo.com](mailto:suryawan2001@yahoo.com) atau [ngurahsuryawan@yahoo.co.id](mailto:ngurahsuryawan@yahoo.co.id)



Rumah *kelihan banjar*, ketua adat Desa Petandakan, Made Gelgel, menjadi saksi bagaimana serbuan massa, para manusia Bali berbaju merah, dengan beringas mengelilingi Putu Negara (40) yang berada di rumah tersebut. Tanpa pikir panjang, Putu yang terjebak dalam kerumunan massa berbaju merah itu (PDIP?), diserang oleh temannya sendiri yang memang telah lama megincarnya. Massa yang kalap dan bersenjata tajam kemudian menebaskan pedang, *klewang*, panah dan batu ke arah Putu. Ditangan korban masih tertancap *taji* (senjata tajam) untuk sabungan ayam yang menusuk tajam. Badan Putu penuh dengan lubang tusukan benda tajam seperti sabit, pisau, *klewang*, panah.

Sementara Ketut Agustana (25), adik Putu, yang melihat kakaknya dikerubuti dan dibantai massa kemudian mengejar dan mendekati kerumunan itu. Massa yang beringas akhirnya juga membantai Ketut tanpa ampun. Ketut tersungkur di antara kerumunan massa dengan dua busur panah yang masih tertancap kuat di lengan kiri korban dan sabetan pedang. Ketut Agustana yang menggunkan celana pendek putih dengan baju biru dan Putu Negara dengan baju putih dengan lengannya berwarna biru serta celana panjang biru, penuh dengan lumuran darah. Kepala kedua korban terus mengeluarkan darah hingga menggenangi tanah.

Setelah dibantai, mayat kedua korban sempat diseret menuju jalan raya oleh massa. Saya menghela nafas, seperti inilah manusia Bali yang disebarakan lewat brosur pariwisata, yang katanya ramah, sopan, murah senyum, bahkan manusia *sapta pesonik*<sup>3</sup> yang selalu tersenyum manis, namun bisa berbalik menebas saudara sendiri? Saya kembali terkejut, dua hari setelah tragedi yang kemudian disebut “Buleleng Berdarah” itu, lewat tayangan berita televisi lokal di Bali, seorang pembantai yang diketahui masih siswa SMU di kota Singaraja, Kabupaten Buleleng mengaku sempat memukul kepala korban dengan batako beberapa kali. Siswa SMU ini sempat diwawancarai dan dengan tertawa menjelaskan semua perbuatannya, bahkan menyempatkan diri untuk mengacungkan jari lambang PDIP tanpa berdosa.

---

<sup>3</sup> Jargon rezim otoritarian orde baru dan negara pariwisata budaya di Bali. *Sapta Pesona* adalah proyek pembangunan citra manusia Bali yang selalu menjunjung tinggi: *keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kesejukan, keramahtamahan, dan kenangan* demi datangnya turisnya dan amannya industri pariwisata. Dengan demikian, manusia Bali bisa tersenyum manis menunggu gemerincing dollar memenuhi kantong mereka. Satu jargon lagi produksi rezim ideologi “pariwisata budaya” adalah menciptakan pulau *Bali yang BALI, Bersih, Aman, Lestari, Indah*.



Putu Negara dan Ketut Agustana adalah dua kader AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) di desanya. Sebelum menyeberang ke Partai Golkar, mereka sebelumnya adalah kader banteng PDIP. Nasib naas menimpa mereka saat ketegangan politik memuncak menjelang kampanye Pemilu 2004. Saat itu, seluruh kader PDIP sedang merayakan ulang tahun mereka dengan acara jalan santai. Massa PDIP yang melintasi desa dengan menggunakan sepeda motor ini melampiaskan dendam mereka, menganggap Putu dan Ketut pengkhianat menyeberang ke Partai Golkar.

Bukan kali ini saja keluarga Nyoman Dangin tertimpa musibah. Hampir sama, menjelang Pemilu 1999, terjadi pengerusakan rumahnya oleh massa bercadar yang diduga berasal dari Partai Golkar. Tapi Dangin mengaku tahu siapa orang-orang yang melakukan aksi pengerusakan tersebut, tapi Dangin tidak ingin menyebutnya. Setelah itu, saat pemilu 1999, massa yang saling bersitegang (PDIP dan Golkar) di desa, sepakat membuat perjanjian berdamai dan tidak mengulangi lagi. ”Dengan kejadian ini berarti mereka melanggar perjanjian dulu, “ kata Dangin. Dangin juga tidak akan pernah melupakan dan akan terus menyimpan dendam terhadap para pembunuh anaknya. Dia sudah tahu siapa pembunuh anaknya, yang juga tetangganya sesama *krama*, warga, Desa Petandakan Kabupaten Buleleng.<sup>4</sup>

Desa lainnya di Kabupaten Buleleng, Desa Banjar namanya, sempat terjadi bentrok massa antara PDIP dan Golkar di satu desa yang menelan korban tewas 17 orang. Malam harinya suasana mencekam dengan penculikan-penculikan orang dan keesokan harinya sudah ditemukan mayat bergelimpangan. Dendam politik antara Golkar dan PDI-P seakan sudah mendarah daging dan menunggu letupan-letupan berikutnya. Desa Banjar saat itu seperti desa mati. Sebagian besar warganya menutup pintu rumah mereka rapat-rapat, seperti menutup pintu hati mereka akan tragedi kekerasan yang sudah akrab mereka saksikan di desa mereka ataupun di sebelah desa mereka, Desa Pedawa yang terkenal dengan desa residivis, pencuri dan preman. Belum terbayangkan bagi saya, bagaimana trauma sang anak melihat kisah akrab kerusuhan, pembantaian disebelah mereka. Atau mereka harus bermain dan bertegur sapa dengan pembunuh ayah atau paman mereka. Dan semuanya begitu akrab terjadi di desa jauh dipelosok gunung ini.

---

<sup>4</sup> Seluruh bahan tragedi “Buleleng Berdarah” Oktober 2003 saya kumpulkan dari catatan lapangan saya (November-Desember 2003) di Buleleng dan laporan media massa di Bali dan nasional. Di antaranya adalah Bali Post (27-30/10/2003), Nusa (26, 28, 30/10/2003), Radar Bali (31/10/2003), dan Kompas (30/10 dan 8/11/2003)



Tragedi “Buleleng Berdarah” Oktober 2003 bagai pecut yang kembali membuka ingatan Ketut Mungkreg, yang dengan suara berat serak-serak saya dengar di sebuah radio, pada sebuah acara *pebligbagan*, urun rembug interaktif. Dari suaranya, saya bisa membayangkan Ketut Mungkreg adalah lelaki tua, cukup berumur untuk mengetahui sejarah di desanya. “*Tiang*, saya, ingin urun rembug kerusakan di Petandakan Buleleng. Sungguh, *tiang* kembali teringat *Gestok* (Gerakan 1 Oktober /G30S 1965). *Mangkin*, sekarang, bukan hanya bayangan, tapi sudah *tiang* lihat di depan mata *tiang*,” ungkapnya denga lirih. Mungkreg yang warga asli Buleleng mungkin pedih saat melihat halaman-halaman koran lokal Bali memuat *headline* berita pembantaian yang terjadi di daerahnya sendiri, ditambah dengan photo vulgar mayat kedua korban terlentang dengan lumuran darah.<sup>5</sup>

Yang ini, tidak ada sangkut pautnya dengan ketegangan partai politik antara Partai Golkar dan PDIP. Hanya dengan kecurigaan, nasib naas menimpa I Wayan Kantun (31) dan I Nengah Data (29) di Desa Batudewa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Wayan Kantun dicurigai oleh masyarakat adat mempraktekkan *pengleakan* (ilmu hitam). Sudah sejak lama ia menjadi incaran masyarakat. Aksi pembakaran yang dilakukan massa adat berjumlah kurang lebih 200 orang terjadi pada Rabu malam, 14 Januari 2004 sampai Jumat malam, 16 Januari 2004. Juga diincar adalah I Nengah Data (29), adik sepupunya yang dicurigai membantu korban.

Kecurigaan masyarakat adat berlangsung sejak lama. Emosi itu dipicu setelah seorang tokoh masyarakat di Dusun Batudewa Kaja yang jatuh sakit. Upaya penyembuhan sudah dilakukan ke salah satu dusun. Tetapi sebagian masyarakat adat tetap emosi dan akhirnya massa mendatangi rumah korban I Wayan Kantun, bertepatan dengan perayaan hari raya *Galungan* (hari raya kemenangan *dharma*, kebajikan melawan *adharma*, kebatilan) Rabu, 14 Januari 2004 pukul 21.00 Wita.<sup>6</sup> Kantun, ayah empat anak dari dua istri ini terus dikejar massa untuk dihabisi.

---

<sup>5</sup> Hampir seluruh media massa di Bali pada Senen (27/10/2003) memuat photo mayat kedua korban sebagai *headline*. Diantaranya adalah Bali Post, Nusa, Fajar Bali, dan Radar Bali.

<sup>6</sup> Banyak kasus-kasus kekerasan “adat” khususnya terjadi pada momen-momen hari-hari raya keagamaan Hindu. Yang paling hangat dan terjadi baru-baru ini adalah pengerusakan rumah warga saat seluruh umat Hindu di Bali merayakan hari raya Nyepi 10-11 Maret 2005. Tragedi pengerusakan dan hujan batu itu terjadi di lingkungan *Banjar* (komunitas adat terkecil) Batuparas, Padangsambian Kaja, Kota Denpasar. Sekelompok warga menghujani rumah warga *Dadia* (garis keturunan darah) Alas Arum yang terdiri dari 13 KK, yang kemudian disebut “kelompok 13”. Batu dan benda keras sambung menyambung mendera atap rumah. Tak pelak, tujuh unit bangunan rumah jadi korban, dua diantaranya rusak berat. Genteng dan kaca pecah, berantakan. “Kejadian muncul spontan, malam hari, karena dipicu sengketa adat berupa pembagian *setra* (kuburan),” ungkap I Made Loteng, *Klian Banjar Pakraman*



Karena Kantun tidak ada di rumah, dua gubuk sederhananya berisi tempat tidur dan dapur dibakar massa. Gubuk yang beratap alang-alang, dinding gedek itu dalam waktu sekejap ludes rata dilalap jago merah.

Kantun melarikan diri dan bersembunyi di kebun jagung. Saat sore hari Kamis, 15 Januari 2004, bunyi derung sepeda motor *krama*, warga adat, lalu-lalang didengarnya semakin ramai. Hal ini menambah rasa was-was dan merasa nyawanya terancam. Kantun merayap ke barat mendekati Desa Tulamben, tujuannya agar semakin jauh dari raungan sepeda motor yang terus memburunya.

Kantun telah bersembunyi selama dua hari di kebun jagung dan telah dua hari dua malam juga ia tidak bisa tidur dan makan. Saat di persembunyian itu, Kantun mengaku menagis. Ia tidak menyangka menjadi tertuduh *ngeleak* dan menjadi buronan saudaranya sendiri, sesama *krama* Desa Batudawa. Ia juga khawatir nasib dua istri dan empat anak-anaknya belum diketahui. “Saya terus berdoa pada *kawitan* (leluhur) agar mendapat perlindungan keselamatan,” tutur Kantun.

Jumat, 16 Januari 2004, Kantun mencoba memilih sembunyi ke tanaman rumput yang tinggi, dimana arealnya tidak pernah dilintasi penduduk. Jumat malam ternyata Kantun tidak tidur. Dirinya masih melakukan perjalanan menyisir sungai sekitar pukul 19.30 Wita. Tetapi rasa takut tetap menghantuinya jika bertemu massa yang akan menghabisinya. Perlahan-lahan Kantun merayap menuju rumah anggota Polsek Kubu I Made Utama. Utama yang tinggal di Dusun Belahu, Desa Tulamben, mengajaknya ke Polsek Kubu. Selanjutnya kantun “diamankan” di Polres Karangasem.<sup>7</sup>

## **Geneologi Politik Kekerasan: Kontestasi dalam Keberingasan**

Narasi dari tragedi “Buleleng Berdarah” 2003 dan kasus I Wayan Kantun adalah satu dari beragam pentas kekerasan yang hadir silih berganti di Bali. Politik kekerasan hadir di depan mata

---

(ketua adat) Batuparas. Kemarahan massa *Banjar* Batuparas berawal dari keluarnya “Kelompok 13” dari keanggotaan *banjar*, sehingga tidak berhak atas kuburan desa. “Kelompok 13” ingin masuk lagi dalam adat dan meminta hak atas kuburan. Akhir dari kasus ini adalah “Kelompok 13” dan *Banjar* Batuparas akhirnya damai, diselesaikan secara adat difasilitasi oleh pemerintah.”Kelompok 13” diperkenankan masuk kembali dalam adat. (Majalah Sarad, *Ricuh Bali di Hari Suci*, No. 60 April 2005).

<sup>7</sup> Semua detail narasi tentang kasus I Wayan Kantun di Desa Batudawa, Tulamben, Kubu Kabupaten Karangasem diambil dari berita media massa, khususnya harian Nusa Januari 2004.



manusia Bali setiap hari. Cerita pedih kekerasan menjadi keseharian dan perlahan mengakrabinya. Geneologi politik kekerasan membentangkan sebuah pertanyaan besar, mengapa manusia Bali begitu mudah terpicu untuk melakukan berbagai tindakan sadistik dan beringas, seperti yang dilakukan kelompok massa (adat) untuk menghakimi salah satu warganya seperti dalam kasus I Wayan Kantun atau serangan massa partai politik membunuh lawannya (kasus twasnya dua anak Nyoman Dangin)?

Dalam Kasus I Wayan Kantun, kasus-kasus kekerasan terjadi dengan sangat mudah menjadi “diadatkan” seperti pada contoh-contoh di atas. Karena “diadatkan”, maka persoalan akan berhenti dalam kesepakatan di dalam desa adat tersebut. Maka dimulailah proyek-proyek untuk melokalitasnya kekuasaan jangka-jengkal tanah di Bali yang dikuasai oleh desa adat/pakraman.

Konflik dan kekerasan yang terjadi ditanggulangi dengan menjelaskan daerah dan wewenang kekuasaan masing-masing desa. Akhirnya, kasus-kasus kekerasan dan potret beringas manusia Bali, tidak dilihat sebagai persoalan konstruksi benih dari relasi politik, kuasa dan pembangunan pariwisata, tapi sebagai masalah bersama bagi Bali untuk menguatkan identitas ke-Balian, menjaga Bali dari pengaruh luar. Ia menjadi semacam gerakan politik identitas etnis. Persoalan saling “cakar-mencakar” sesama manusia Bali harus dicarikan musuh bersama yang bisa menyatukan manusia Bali untuk tetap bertahan dan kokoh dengan budayanya.

Kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Bali, seperti yang dialami Kantun dianggap sebagai kasus-kasus kebudayaan yang bisa diredam dengan pendekatan “keamanan” dan demi berlangsungnya “pariwisata budaya”. Justru yang harus dibongkar adalah mengapa manusia Bali begitu beringas di tengah “adat dan kebudayaan” dan pariwisata? Ini akan mendekonstruksi politik dan kuasa pada kebudayaan Bali. Kecurigaan melakukan *pengeleakan* adalah pemicu di permukaan, dibaliknya persoalan yang lebih dalam. Justru kerumitan subyektifitas manusia Bali yang melakukan kekerasan diredam dengan pernyataan, “Ini adalah masalah adat dan kebudayaan yang bisa diselesaikan intern desa”.

Kasus Kantun menunjukkan bagaimana ia harus berserah dan menerima tuduhan dari “adat” bahwa ia melakukan praktek *pengeleakan*. Atas nama adat dan kebudayaan akhirnya menjadi poin penting berlangsung dengan langgengnya politik kekerasan di Bali. Politik adat menjadi



legitimasi berlangsungnya kekerasan. Atas nama adat yang begitu pelik dan rumit—di dalamnya manusia Bali bertarung merebutkan kuasa, pengaruh dan kepentingan—subyektifitas manusia Bali menentukan gerak politiknya. Adat bisa menjadi berwajah negara yang melakukan tekanan, teror dan kekerasan terhadap *kramanya* sendiri.<sup>8</sup> Ini nyata dialami Kanton. Karena kekuasaan adat membuatnya “terasing” dan tersingkir dari komunitasnya. Siapa yang menggerakkan dan menguasai adat? Manusia Bali sendiri, saudara-saudara dari I Wayan Kanton. Mungkin di sini kontestasi dan kuasa manusia Bali paling nyata terjadi, pada komunitas adat, dengan riuh glamour upacara dan massifnya kuasa dan kekerasan beroperasi.

Sementara negara dengan mudah berlindung sebagai “fasilitator”, memfasilitasi, sebagai penengah dari rangkaian kasus kekerasan adat yang terjadi. Seolah memang benar-benar terjadi kekerasan horizontal antar warga adat, tanpa campur tangan dari negara. Intervensi negara terlihat jelas dari bagaimana ia mentransformasikan ide-idenya pada masyarakat adat. Maka tidaklah heran, banyak masyarakat adat yang berwajah negara. Kasus-kasus pencaplokan lahan-lahan untuk infrastruktur pariwisata menunjukkan bagaimana kolaborasi negara dengan elite lokal adat, untuk membangun perjanjian dan kesepakatan. Negara *mensupport* kehidupan ritual dengan sumbangan ratusan juta rupiah, tapi juga menanamkan saham kepentingan di dalamnya. Negara menjadi salah satu pemicu konflik adat, melalui perpanjangan tangannya, para manusia-manusia Bali yang sudah berwajah negara.

---

<sup>8</sup> Saat zaman orde baru, negara menciptakan sebuah lembaga pembina lembaga adat bernama MPLA (Majelis Pembina Lembaga Adat). Kini, saat zaman reformasi, lembaga tersebut bubar dan sedang dirintis Majelis Madya Desa Pakraman di setiap kabupaten dan kota di Bali, dan Majelis Utama Desa Pakraman di propinsi. Salah satu agenda dari gerakan institusi adat di Bali itu adalah gerakan *Bali Mawacara* (Bali berbicara/bersikap), bukan lagi terbelah dalam sikap-sikap *Desa Mawacara* (setiap desa berbicara/bersikap). Pernyataan itu saya dengarkan saat mengikuti *Temu Wirasa Mulat Sarira* (temu keakraban untuk mengkoreksi diri) untuk refleksi akhir tahun 2003 di Pura Samuan Tiga, sebuah pura di Kabupaten Gianyar pada 20 Desember 2003. Tema *Temu Wirasa* ini adalah *Ngastitiang Kerahayuan Jagad Bali* (mendoakan keselamatan, kedamaian bumi Bali). Tokoh yang hadir adalah Kapolda Bali, Mangku Pastika dan rohaniawan Ida Pedanda Made Gunung. Tersirat jelas dalam pertemuan itu kolaborasi yang manis antara negara (kepolisian) dengan desa adat/pakraman untuk kembali lagi melakukan pendekatan keamanan dalam melindungi desa pakraman. Itu terungkap jelas dari pernyataan Kapolda Mangku Pastika mengemukakan gagasannya tentang “*Manajemen Keamanan Terpadu*”. Manajemen pendekatan keamanan ini, kata Kapolda, diwujudkan dan dipelihara dengan kondisi dinamis yang terjadi di masyarakat. Untuk itulah ia mengajak bersama-sama dengan Desa Pakraman untuk menciptakan keamanan. Keamanan, kata Kapolda, terdiri dari *securuty*, rasa aman itu sendiri, keselamatan, kepastian, dan kedamaian. Mangku Pastika juga menekankan, “Dengan adat, budaya, dan agama yang satu, yaitu agama Hindu, adalah modal dasar untuk mewujudkan keamanan berlandaskan adat, budaya, agama. Semuanya itu ada di Desa Adat/Pakraman,” ujarnya. *Ngastitiang Kerahayuan Jagad Bali*, (Mendoakan Kedamaian Bumi Bali), ajaknya untuk bersama-sama Kepolisian dan Desa Pakraman menjaga Bali.



Selain itu, pentas pertarungan politik dan perebutan kekuasaan—dalam Pemilu 1999, 2004 dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah langsung) Juni 2005 lalu—mungkin salah satu ruang yang menjadi arena pertarungan kekerasan dari para kontestannya, para manusia Bali. Dalam pertarungan itu, terjadi kerumitan relasi, kepentingan, dan kuasa. Di dalamnya terkuak sebuah relasi hubungan manusia Bali dengan “budayanya”, “negara” dan kekuasaan. Semuanya terbingkai dalam sebuah konstruksi politik kebudayaan, pembangunan dan pariwisata yang menjadi *panopticon* gerak-gerik manusia Bali.

Lalu, bagaimana semua *discourse* tersebut sampai mempengaruhi kehidupan manusia biasa, seperti Nyoman Dangin, yang kehilangan dua putranya hanya karena menjadi kader Partai Golkar? Ia menanggung kepedihan, ingatan, derita, dan dendam. Bagaimana persaingan politik, kepentingan kekuasaan para elite sampai berpengaruh pada masyarakat bawah untuk saling bunuh antar sesamanya. Bagaimana semuanya beroperasi dalam sebuah konteks bernama politik kekerasan di Bali?

Tidak ada jawaban yang memuaskan. Tapi, marilah mencoba mengurai kerumitan itu dari pentas politik manusia Bali di tahun berdarah 1965-1966, ketika 80.000 hingga 100.000<sup>9</sup>, satu berbanding dua belas penduduk Bali ketika itu tewas di tangan saudaranya sendiri. Jejak-jejak “manusia merah” di Pulau Dewa ini mengundang segudang tanya, bagaimana operasi politik kekerasan sampai menyentuh kehidupan manusia biasa? Benarkah manusia Bali saling berbeda ideologi, antara komunis dan nasionalis? Atau konflik *kasta*/kelas dalam manusia Bali memang benar-benar terjadi? Bagaimana manusia Bali mengingat dan melupakan tragedi itu? Dan bagaimana ia “berpolitik” sehingga pembantaian sesama saudara menjadi jalan keluar?

Beragam analisa mencoba menjawab akar masalah manusia Bali saling bantai tahun 1965-1966. Pertanyaannya tentu saja, bagaimana operasi dan stimulasi konflik, persaingan politik, kasta, ritual, sentimen pribadi itu bekerja sampai membuat orang saling membunuh? Dan bagaimana kekuatan “negara”, lewat propaganda partai politik, militer, birokrasi sampai mempengaruhi orang untuk saling membunuh? Atau kedua pemilahan itu sudah kabur dan keduanya saling berelasi untuk membuat manusia Bali saling membunuh? Atau bahkan cara berpikir seperti

---

<sup>9</sup> Soe Hok Gie, *Zaman Peralihan*, 1995. Satu essaynya menjelaskan jumlah manusia Bali yang tewas dalam “penyembelihan” massal itu adalah, *Di Sekitar Peristiwa Pembunuhan Besar-Besaran di Pulau Bali* (161-169).





“negara” dengan kewaspadaan dan ajakan “mengganyang komunis sampai ke akar-akarnya” telah diserap dan diterapkan manusia Bali untuk membunuh saudaranya. Tidak dapat dibedakan mana “rekayasa politik negara”, konspirasi, pertarungan politik atau yang lainnya, karena semua pemilahan-pemilahan, kategori itu telah melebur menjadi satu dalam amuk massa penyembelihan manusia.

Keberingasan itu mengandung misteri, sekaligus tanda tanya besar untuk membongkar politik kebudayaan dan kekerasan yang selama ini terjadi di Bali. Tragedi '65 sebenarnya menjadi katup pembuka bagaimana mempelajari kekerasan di Bali yang menjadi kisah “tersembunyi” keakraban sehari-hari, tapi juga tidak dapat dibohongi menjadi borok menganga terbungkamnya ingatan menjadi dendam yang terpendam lama, dan kemudian termanifestasikan dalam beragam pentas-pentas kekerasan yang terjadi hingga kini di Bali.

Politik kekerasan kadang tenggelam dalam argumentasi *political correct*, bahwa semua yang terjadi murni adalah pertarungan politik, benturan ideologi, kasta/kelas, perang dingin, bertarungnya kapitalisme dan komunis yang diwakili AS dan Uni Sovyet atau penjelasan “wacana besar” lainnya. Tapi, bisakah kita menjelaskan bagaimana “wacana besar” itu dipahami oleh rakyat kecil di negara miskin bernama Indonesia? Bagaimana pentas pertarungan kelas tinggi itu berdampak pada kepedihan manusia yang ditinggal suami, istri, ayah, kakek, atau saudaranya?

Kejamnya manusia Bali saat hari-hari pembantaian 1965-1966 adalah cermin perilaku politik mereka sebenarnya. Konflik, persaingan, ketegangan politik, agama, pribadi akhirnya melahirkan sebuah penghilangan nyawa manusia terkeji dalam sejarah peradaban manusia Bali dan Indonesia. Manusia Bali adalah subyek, kontestan terpenting dalam tragedi tersebut. Konspirasi besar, “wacana besar” ketegangan politik kelas tinggi, pertarungan ideologi politik dan lainnya, mungkin jauh dari bayangan para ninja *temeng*, milisi sipil berpakaian serba hitam yang melakukan pembantaian. Politik kelas tinggi itu bukan penyebab yang kuat untuk berlangsungnya pembantaian. Politik “besar” itu diturunkan menjadi politik-politik lokal, subyektifitas lokal manusia Bali serta sejarah-sejarah konflik lokal.



Kiprah manusia Bali dalam jejak sejarah pembantaian 1965-1966 adalah pertarungan memperebutkan klaim otoritas dalam sejarah, konflik dan kuasa lokal. Berbagai ketegangan politik “besar”, sejarah “negara” bertransformasi dalam beragam pertarungan-pertarungan lokal, sejarah dan konflik antara manusia Bali. Pertarungan sejarah lokal ini berelasi kuat pada perilaku dan otak manusia Bali yang telah berwajah “negara”. Akhirnya, ketegangan politik termanifestasi dalam dua wajah perilaku politik manusia Bali, *pertama* menyerap perilaku serta ideologi negara, dan *kedua* menjadi salah satu kontestan dalam pertarungan konflik lokal. Keduanya saling mengalami gugatan, berelasi dalam ajang konstestasi yang disebut Soe Hok Gie sebagai penyembelihan manusia Bali besar-besaran yang dilakukan oleh *setan hitam berbarek merah* yang berkeliaran di mana-mana pada waktu itu (tahun 1965-1966).<sup>10</sup>

Dalam gugatan dan kontestasi inilah manusia Bali dengan sejarah dan konflik lokalnya mempunyai subyektifitas lokal yang begitu lentur dan bisa tertarik-tarik. Subyektifitas itulah yang mendasari setiap gugatan dan perilaku manusia Bali dalam politik. Tapi subyektifitas lokal manusia Bali juga sangat mudah terseret menjadi wajah obyektifitas “negara” yang menjadikan manusia Bali sebagai agen-agensya. Kontestasi subyektifitas lokal dalam pembentukan sejarah harus bertarung dengan operasi “negara” yang sangat kuat membentuk karakter manusia Bali, dan keduanya saling berelasi dan berubah wujud dan sulit untuk dibedakan. Subyektifitas lokal manusia Bali kini telah berwajah negara.

Pembantaian manusia Bali 1965-1966 adalah salah satu relasi, pertarungan, dan gugatan dari “subyektifitas lokal” dengan “operasi politik negara”. Subyektifitas lokal ditunjukkan dengan ketegangan politik, sosial, ekonomi, ritual, sentimen pribadi dan konflik internal manusia Bali sesamanya, dan ini telah lama ada. Sedangkan politik negara beroperasi dalam pertarungan ideologi partai politik dan perebutan kekuasaan. Konflik ini bertemu dan kemudian melahirkan kebrutalan.

Manusia Bali adalah bagian konflik dan kebrutalan itu. Saat pembantaian terjadi, banyak yang menyebutkan semuanya adalah buah dari pertarungan ideologi politik antara PKI yang komunis dengan PNI yang nasionalis. Dalam kasus Bali, pembantaian “manusia merah” itu sering

---

<sup>10</sup> Soe Hok Gie, *op.cit.* Lihat juga Robert Cribb (ed) *The Indonesian Killings, Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, 2000, hal. 406-439 dan Geoffrey Robinson, *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*, 1995.



disebutkan karena konflik *kasta* antara desa A yang *waysia* dan *sudra*, dan karena itu disebut PKI dengan desa B yang *brahmana* dan *ksatria* dan karena itu ia adalah PNI. Dengan mengkonstruksi konflik seperti itu, seolah-olah subyektifitas manusia Bali dalam konfliknya menjadi hilang. Segala macam kerumitan dan diskursifnya konflik, yang bisa menyebar dalam berbagai macam bentuk dan pertarungan, menjadi hilang tersapu jargon dan konstruksi besar konflik kasta atau mengkastakan konflik. Justru konstruksi inilah yang akan berakibat pada penyederhanaan kerumitan yang menyertai perilaku beringas manusia Bali tahun 1965-1966.<sup>11</sup>

Beragam analisa dan argumentasi muncul, tapi belum ada yang memuaskan untuk menjelaskan kenapa manusia Bali bisa saling bunuh sesama saudaranya di tahun 1965-1966? Mungkin saja, salah satu penyebabnya adalah beragam analisa itu terperangkap untuk membingkai kejinya manusia Bali dengan jargon-jargon yang besar dan membuat konflik kekerasan sungguh rasional hanya karena berbeda ideologi dan kepentingan politik. Konflik dikesankan canggih dan pelakunya terlibat secara rasional. Pokoknya harus berbeda, *mepapas*, adalah jargon dangkal untuk membungkus subyektifitas manusia Bali yang penuh dengan pertarungan, kepentingan dan relasi-relasi politik. Kecanggihan konflik kadang menenggelamkan narasi-narasi kecil, pergolakan manusia dengan hidup dan pertarungan sejarah.

Degung Santikarma, antropolog Bali, dalam sebuah kesempatan pernah menyatakan dengan jargon-jargon besar itu, konflik dan kekerasan terkesan canggih dan anggota *banjar* (desa adat/pakarman) yang terlibat terkesan semuanya rasional. Dengan membungkus konflik dengan jargon-jargon seperti mengkastakan konflik dan kekerasan akan mendepersonalisasikan konflik. Subyektifitas dan kerumitan internal menjadi lenyap.<sup>12</sup>

Manusia Bali dalam “tahun-tahun yang hilang” dalam sejarah peradabannya, tahun 1965-1966, adalah pergolakan penuh dengan kepentingan, konflik dan sejarah lokal dengan subyektifitas internal para manusianya. Semuanya termanifestasi dalam segala macam pertarungan politik lokal, ritual, kelas/kasta, tanah, sentimen pribadi, dan segala macam kerumitan manusia Bali.

---

<sup>11</sup> Semua bagian tentang kontestasi dan subyektifitas sejarah pada manusia Bali mendapatkan masukan dan inspirasi dari beberapa pendapat. Saya harus mengucapkan terimakasih kepada Degung Santikarma atas perspektif ini, juga kepada Henk Schulte Nordholt lewat inspirasi geneologi kekerasan di Bali melalui bukunya dan sudah tentu Geoffry Robinson dalam *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*, 1995, khususnya *chapter 12, Myth and Reality in Bali*.

<sup>12</sup> Komunikasi pribadi dengan Degung Santikarma via email, Juni 2005.



Peristiwa '65 menjadi titik kulminasi, sebuah pentas untuk bertemunya segala macam konflik dan kepentingan lokal manusia Bali, yang telah lama tumbuh dan tersemai dalam beragam peristiwa kekerasan dengan penetrasi politik negara bahkan internasional dalam pertarungan politik antara komunisme dengan kapitalisme.

Kini, industri pembentukan manusia Bali berhutang pada pembongkaran geneologi politik kekerasan yang selama ini terjadi. Tersapunya ingatan kekerasan dalam manisnya industri pariwisata adalah wacana penting terbentuknya manusia Bali. Mereka dibentuk oleh wacana negara (pariwisata budaya) untuk kemudian dipraksiskan dengan cerdas oleh manusia-manusia Bali sebagai perpanjangan tangan negara dalam bentuk kapital (pariwisata)

### **Dari Tradisional ke Brutal: Pentas *Pecalang*, Para Jago, Milisi, dan Preman**

Jika pada masa kini, manusia Bali berubah menjadi manusia bercadar, seperti ninja menculik musuhnya, yang terjadi pada pertarungan politik dalam Pemilu 1999 dan 2004 serta Pilkada 2005 baru-baru ini, seorang nenek tua, *Odah Mangku* melihat manusia ninja pada zamannya. Merekalah ninja bernama *tameng* (satuan milisi dari PNI dan pemuda desa yang dilatih tentara untuk membasmi sampai ke akar-akarnya manusia Bali yang dituduh anggota dan simpatisan PKI).

*Odah Mangku* adalah istri dari tokoh PNI di desanya. Saat seruan gerakan mengikis habis komunis sampai ke akar-akarnya dicanangkan, rumahnya menjadi markas barisan *tameng* dan massa barisan “Pengganyangan Komunis”. Setiap hari rumahnya ramai dengan pasukan *tameng* berseragam serba hitam bersenjata samurai, *klewang*. Sore hari mereka siap-siap untuk menghabiskan *jatah* (daftar bagian orang yang harus dibunuh) di desa tetangga. Tengah malam mereka datang dan acara berlanjut dengan pesta *lawar* (makanan tradisi Bali dari daging babi) dan *arak*. *Odah Mangku* menyaksikan saat para *temang* ini datang dengan berbaju hitam, *klewang* terhunus dan tangan yang berlumuran darah.<sup>13</sup>

Jika para *tameng* saat tahun 1960-an digunakan sebagai barisan milisi menumpas komunis, para jagoan-jagoan lokal itu kini berubah wujud dalam berbagai macam bentuk satuan-satuan siap siaga. Bisa menjadi manusia-manusia bercadar, para ninja, barisan jagoan dalam organisasi-

---

<sup>13</sup> Seperti dituturkan *Odah Mangku* pada suatu kesempatan di rumahnya, Januari 2005.



organisasi massa, satuan-satuan tugas (satgas) partai-partai politik, atau menjadi satuan milisi adat bernama *pecalang*. Para jagoan ini bisa memainkan peranannya di berbagai lahan jasa pengamanan.

Sebutlah misalnya *pecalang*. Sebagai satuan pengamanan adat, saat masa kolonial, menyebutnya sebagai *pecaling*, orang yang mempunyai *caling* (taring) yang mempunyai ketajaman indera untuk menjaga wilayah desa menjadi aman. Ada juga satuan-satuan milisi yang dibuat pada zaman Bali kolonial seperti *sikep* atau *dolap*. Tugasnya adalah mengamankan pelaksanaan adat/ritual di desa-desa.<sup>14</sup>

Tapi kini, *pecalang* menjadi *idol* dan jaminan keamanan desa-desa di Bali. Hampir semua desa kini menganggarkan dana adat/ritualnya untuk membelikan para satuan *pecalang* ini baju seragam, rompi, destar, pakaian adat *poleng* (hitam putih). Bahkan desa adat yang lebih maju, seperti desa adat Kuta misalnya, melengkapi satuan *pecalang*nya dengan *handie talkie* (HT), kantor jaga, bahkan mobil operasi kerja.

*Pecalang* menyeruak dan menjadi perdebatan saat sukses mengamankan Kongres I PDIP di Bali 1999. *Pecalang* menjadi kata sakti dan jaminan keamanan Bali. Serta merta setelah melihat keberhasilan *pecalang* dalam mengamankan kongres PDIP I dan kembali diulangi pada kongres ke-II 2005, desa-desa adat seluruh Bali seperti keranjang membuat satuan-satuan *pecalang*. *Pecalang* juga bertugas melakukan patroli keamanan desa. Dalam wilayah kekuasaan desa adat, toko-toko diwajibkan menyumbang untuk dana *jaga baya* (uang keamanan) untuk operasi satuan pengamanan tradisional ini. *Pecalang*pun menjadi tenaga keamanan dalam razia penduduk pendatang, *sweeping*, bahkan untuk menjaga pesta perkawinan dan konser-konser musik.<sup>15</sup>

Ada cerita menarik seorang kawan. Di sebuah pasar tradisional terbesar di Denpasar, pasca terjadinya perusakan kantor kepala pasar oleh sekelompok (preman) orang tidak dikenal,

---

<sup>14</sup> Belum ada yang meneliti lebih jauh tentang geneologi politik dari *pecalang* ini. Diantaranya ada satu skripsi dari jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana yang mengkaji tentang *pecalang* sebuah desa di Kota Denpasar, 2004. Juga buku kecil dari Lembaga Penelitian Kebudayaan dan Pariwisata Universitas Udayana tentang *Sesana* (etika, aturan) *pecalang*. Juga essay saya, *Pecalang dan Penjaga Kebudayaan Bali* (Kompas, 22/10/2002), juga dalam buku *Bali, Narasi dalam Kuasa (Politik dan Kekerasan di Bali)*, April 2005, hal. 286-297 dan *Pecalang Politik dan Para Milisi* (Kompas, 17/04/2005)

<sup>15</sup> Sebagian besar bahan di bagian ini diambil dari essay saya *Pecalang Politik dan Para Milisi* (Kompas, 17/04/2005) dengan melakukan perbaikan lagi.



dibentuklah satuan pengamanan untuk pasar tersebut. Sahabat saya seorang pedagang di pasar tersebut bercerita dengan polos. “Saya lihat rompinya bisa dibolak-balik. Kadang bertuliskan “Satgas Pasar” dan jika dibalik bertuliskan “*Pecalang* Pasar”.”<sup>16</sup> ujarnya. Orangnyanya sebenarnya sama saja, Cuma berubah rompi dan sudah pasti berubah busana.

*Pecalang* sering dikritik berlaku arogan dan seenaknya untuk menutup jalan. *Pecalang* juga sering memantik konflik dengan peringai mereka yang kasar dan *sok* kuasa. Ini dirasakan sekali saat *pecalang* melakukan pengamanan untuk upacara adat. Bukannya untuk mengamankan, bahkan menimbulkan masalah baru untuk diamankan. *Pecalang* sebagai satuan pengamanan tradisional memang tidak siap dan tidak dilatih untuk melakukan pengamanan yang biasa dilakukan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kesan *pecalang* sebagai penjual jasa keamanan terlihat jelas dari kepentingan desa adat untuk memungut biaya penduduk dinas (pendatang). Ini juga dilema yang dihadapi desa adat. Mereka jelas berorientasi untuk materi untuk menghidupi kegiatan-kegiatan adat dan budaya di desa. Sementara mereka juga harus berlaku keras dengan merazia penduduk yang membludak datang ke daerah mereka. *Pecalang* menjadi senjata utama untuk melakukan razia tersebut dibantu oleh Tim Pendataan Penduduk di masing-masing *Desa Pakraman* di Bali. Aksi mereka inilah yang banyak dikeluhkan oleh penduduk pendatang. Saat malam-malam, mengedor rumah untuk memeriksa KTP dengan sikap keras, kasar dan arogannya.

*Pecalang* juga kata sakti untuk melakukan pengamanan di daerah-daerah “basah”, rawan konflik dan pertarungan lahan para preman dan jagoan lokal. Daerah-daerah seperti pasar, terminal, kafe-kafe juga telah mempekerjakan *pecalang* di samping Satpam (Satuan Pengamanan). Saya melihat dengan jelas di sebuah rumah makan siap saji di Denpasar, *pecalang* bersanding dengan Satpam untuk mengatur kendaraan yang parkir penuh di rumah makan tersebut. Begitu juga dengan pasar dan terminal. Para preman biasanya dengan mudah mengubah dirinya menjadi *pecalang* dengan simbol adat untuk menguasai daerah kekuasaan mereka dari preman lainnya.<sup>17</sup>

Peran hampir mirip dilakoni oleh para milisi, organisasi massa yang para anggotanya kadang juga menjadi *pecalang* di desanya. Tempat-tempat strategis dan potensial untuk perebutan sumber

---

<sup>16</sup> Catatan lapangan dan wawancara di Pasar Tradisional di pusat kota Denpasar, Oktober 2004.

<sup>17</sup> Catatan lapangan di kota Denpasar, Februari 2005.



ekonomi ini bisa di terminal, tempat-tempat keramaian dan hiburan seperti kafe-kafe, diskotik menjadi sasaran dari para milisi dan organisasi massa ini. Bisa juga pasar tradisional bahkan yang lumrah terjadi adalah pengerahan kelompok/organisasi massa dengan kekuatan yang besar untuk kepentingan politik saat pesta demokrasi pemilu, kampanye dan Satuan Tugas (Satgas) partai politik.

Para kelompok massa—yang biasanya dikomandoi oleh orang kuat lokal dengan perjalanan sejarah perkelahian dan kekuasaannya—biasanya memilih untuk menjadi tenaga pengaman dalam sebuah aktivitas partai politik. Kampanye Pemilu 2004 lalu di Bali memberikan gambaran bagaimana pertarungan jasa pengamanan dari kelompok organisasi massa ini. Bukan hanya pertarungan elite politik saja yang mendapat tempat, tapi juga tenaga pengaman, satuan jagoan, para milisi yang ditugaskan untuk menjaga para elite partai dan mensukseskan kegiatan partai politik tersebut. Jadi bukan hanya jasa dari *pecalang* saja, tapi jasa para milisi dan organisasi massa juga berperan sangat penting.

Para milisi itu bertebaran di seluruh daerah Bali. Para jagoan ini membentuk organisasi-organisasi massa yang bisa digunakan menjadi broker kekerasan. Aksi mereka terlihat jelas dalam setiap pentas pertarungan politik dan kekuasaan. Sebut saja misalnya momen Pemilu 2004 lalu menjadi persaingan para broker kekerasan ini untuk menawarkan jasa pengamanan pada setiap partai politik. Sebagai kompensasinya, mereka akan masuk menjadi bagian dari kekuasaan itu.

Geneologi terbentuknya para milisi dan jagoan ini bereleasi kuat dari ketidakmampuan negara untuk menangani berbagai tindak kriminal yang terjadi di masyarakat. Akhirnya, kekuatan negara dan para jago ini memilih untuk bekerjasama melaksanakan sebuah agenda. Contoh-contoh dari *pecalang* yang dilatih oleh polisi serta kekuatan-kekuatan tentara dalam satuan dan jasa pengamanan sudah menjadi rahasia umum. Kasus para militia saat pembantaian massal PKI di Bali menunjukkan itu semua. Para *tameng*—barisan pemuda dari PNI (Partai Nasionalis Indonesia) yang dilatih tentara untuk melakukan pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan



PKI—dijadikan bempër untuk mengadu domba rakyat, sementara tentara menyaksikan bagaimana brutalnya pembantaian dilakukan tanpa kejelasan dan alasan yang tepat.<sup>18</sup>

Setelah *tameng* melakukan pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan PKI, selanjutnya para *tameng* ini yang dibunuh oleh tentara karena mereka juga menjadi daftar hitam serta untuk melenyapkan jejak-jejak kesaksian mereka. Sejarah *tameng* kemudian diikuti oleh terbentuknya milisi-milisi yang secara sumir sebenarnya menyiratkan semua itu.

Geneologi organisasi massa di Bali menyebut nama-nama seperti Armada Racun dan Pemuda Denpasar tahun 1970 hingga 1990-an. Saat kedua nama besar itu tamat riwayatnya, sebagian dedengkotnya sudah mulai menua, kini di kota Denpasar setidaknya muncul dua organisasi massa besar yang sangat berpengaruh. Keduanya saling bersaing dan menjatuhkan. Pertama adalah **FPD (Forum Peduli Denpasar)**, organisasi massa yang “semi legal”. Deklarasi forum pada 20 November 2002 mendapatkan liputan media yang besar. Media massa paling berpengaruh di Bali, Bali Post, bahkan melakukan wawancara mendalam dengan Ketua FPD, Sutama Minggik, sepanjang satu halaman. Dalam pendeklarasian forum ini turut hadir Walikota Denpasar, AA Pusapayoga, kalangan pemerintah, elite politik, mahasiswa, intelektual, dan tokoh masyarakat.<sup>19</sup> Dalam susunan pengurusnya yang dimuat di koran tersebut tertulis bahwa pelindung organisasi ini adalah Walikota Denpasar. Sedangkan penasehatnya adalah kalangan intelektual di Bali. Kiprah organisasi ini kemudian memilih untuk bergabung ke PDI Perjuangan dalam Pemilu 2004 dan tetap menguasai lahan-lahan “basah” di kota Denpasar seperti terminal dan pasar-pasar.

Fenomena terbentuknya organisasi ini sangat menarik karena mendapatkan restu dan perlindungan dari pemerintah dan birokrasi. Dalam setiap pertarungan dan kontestasi politik, para pejabat dan elite politik merasa belum percaya diri sebelum *didekkingi* (dilindungi, mendapatkan pengawalan dan jasa pengamanan) dari para jagoan, milisi atau “memelihara” preman. Bahkan gejala untuk “memelihara” para jagoan-jagoan lokal ini menjadi bukti bagaimana saling menguntungkan hubungan antara para jagoan dengan elite politik, pemerintahan dan birokrasi. Kehadiran para jagoan ini sebagai berikade dari tokoh politik atau masyarakat jika

---

<sup>18</sup> Keterangan dari hasil wawancara dengan para *survivor* Tragedi '65 di Bali, tentang kiprah para tameng, para milisi yang melakukan pembantaian terhadap orang yang dituduh PKI, Jembrana Bali, Maret 2005.

<sup>19</sup> Liputan besar pendeklarasian organisasi ini di Bali Post 21-25 November 2002.





diserang oleh lawan politiknya dengan kelompok jagoan dan massa yang lain. Satuan tempur adalah salah satu sebutan dari kelompok para jagoan ini.<sup>20</sup>

Anggota FPD adalah sopir-sopir angkutan umum, pegawai Terminal Ubung dan ada juga yang menjadi elite politik di DPRD Kota Denpasar. FPD adalah loyalis PDIP dimana Walikota Denpasar, AAN Puspayoga, menjadi tokoh kuat dan juga adalah keturunan Puri Satria. FPD saat ini menguasai wilayah Terminal Ubung atas restu dari Walikota Denpasar AAN Puspayoga. Aksi FPD di terminal terbesar Bali ini adalah melakukan penusukan saat acara pergantian pengurus bus Akas jurusan Denpasar-Jember, Jumat (2 Januari 2003) pukul 10.00 Wita. Seorang pengurus baru yaitu Yonanes Bambang Reni ditebas pedang oleh lima orang tak dikenal menggunakan *helm* menyerang saat rapat di Lantai dua di Kantor Terminal Ubung. Akibatnya Bambang Reni sempat kritis dan tidak sadarkan diri selama tiga hari karena luka berat akibat tebasan pedang di tangan kanannya yang hampir putus, dada kanan dan perut sehingga ususnya terurai.

Kejadian bermula saat para pengurus bus Akas yang juga dihadiri oleh Kepala Terminal Ubung, Wayan Sutika, membahas soal penunjukan Bambang Reni yang terpilih sebagai pengurus baru menggantikan Selamat (40). Setelah setengah jam rapat dimulai, lima orang berbadan tegap dengan memegang pedang, belati, tombak datang ke lantai dua, tempat berlangsungnya rapat. Anehnya hanya Bambang Reni yang diserang. Dalam rapat tersebut, tengah berlangsung perdebatan kenapa Bambang Reni yang terpilih? Dan juga pergantian ketua dinilai terlalu cepat. Bambang Reni terpilih diduga karena kedekatannya dengan salah satu keluarga bos Akas pusat.

Akar masalahnya ternyata ada koperasi angkutan yang dikelola oleh FPD (Forum Peduli Denpasar). Koperasi ini membawahi semua Po-Po Bus, para sopir, pedagang di Terminal Ubung. Banyak dari anggota koperasi ini adalah anggota FPD. Akas dalam pimpinan Bambang Reni akan mengurus dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari FPD sebagai penguasa secara umum di Terminal Ubung. Hal inilah yang menimbulkan kemarahan FPD karena Akas dan Bambang Reni ingin lepas dari koperasi angkutan yang dikelola oleh FPD. Ditambah lagi, Bambang Reni sebagai “orang baru” di Terminal Ubung, tidak layak untuk menduduki jabatan itu. Banyak orang-orang FPD yang menunggu antrean jabatan tersebut. Bahkan sebelumnya ada orang FPD

---

<sup>20</sup> Studi awal mengenai kelompok FPD saya mulai pada April 2004 seiring mulai mencuatnya kelompok ini dalam setiap konflik ekonomi politik yang terjadi di kota Denpasar.



yang sering nongkrong di Terminal Ubung ditawarkan untuk menjadi Ketua Akas, tapi kemudian beralih begitu saja ke Bambang Reni.<sup>21</sup>

Sutama Minggik, akrab dipanggil Minggik, dedengkot FPD sebenarnya punya riwayat panjang dalam dengan dunia organisasi massa, politik dan preman di Bali. Minggik dengan sosok kekar, tato di lengan, dan berkumis tebal. Minggik dilahirkan di Denpasar 15 Juni 1952. Ia tidak menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Dunia preman digelutinya saat menjadi anggota Armada Racun (1973-1975), organisasi preman di Bali yang terkenal saat itu. Selanjutnya kiprahnya terlihat di Suka Duka Pemuda Denpasar (1975-1982), Yayasan Suka Duka Denpasar, Ketua Koperasi Taxi Ngurah Rai unit Terminal Ubung, Penasehat Koperasi Sarana Marga Utama. Dari tahun 1968-1999, Minggik adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Gubernur Bali. Pada selang waktu inilah Minggik memanfaatkan waktunya menjadi sopir angkutan umum.

FPD bagi Minggik adalah segala-galanya. Ia membentuk forum ini sebagai sebuah organisasi sosial, ikut bersama-sama pemerintah dan masyarakat umum untuk bersama-sama menanggulangi masalah sosial di Denpasar. Masalah yang paling krusial menurut Minggik di Kota Denpasar adalah kependudukan. FPD siap membantu pemerintah kota, desa adat/pakraman dan dinas untuk melakukan razia penduduk-penduduk liar atau penganguran terselubung yang datang ke Denpasar. Bagi Minggik, masalah penduduklah yang menjadi pemicu masalah-masalah sosial yang sering terjadi di Denpasar.

Saingan FPD adalah **Laskar Bali**, yang awal terbentuknya dari pertarungan melawan FPD. Ini terjadi bulan Juni-Juli 2002. Kejadiannya di Akasaka diskotik dan karaoke di kawasan Jalan Teuku Umar, simpang siur Denpasar. Yang bertugas menjadi staf keamanan, yang menguasai diskotik ini awalnya adalah anak buah dari Anak Agung Alit Kusuma Wedanta (42), akrab dipanggil Gung Alit, yang kemudian menjadi embrio kelahiran Laskar Bali. Kelompok Gung Alit ini sering menjadi penjaga keamanan tidak resmi dari beroperasinya diskotik di kota Denpasar yang sangat terkenal dengan huburan malam, prostitusi dan peredaran narkobanya. Sampai pada suatu malam, datang kelompok dari FPD, diantaranya adalah Dewa Saraf dan lainnya. Dewa Saraf dan kelompok FPD ingin merebut lahan dari kelompok Gung Alit dan anak buahnya.

---

<sup>21</sup> Semua catatan dari kasus penusukan ini didapatkan dari catatan lapangan di Terminal Ubung, wawancara dengan sopir-sopir dan pemilik warung, ditambah dengan liputan media massa tentang kasus ini, Bali Post, Nusa, dan Radar Bali, Januari 2003.



Akhirnya terjadilah insiden penusukan terhadap Dewa Saraf yang dilakukan oleh anak buah Gung Alit. Setelah peristiwa itu, kedua geng saling bersitegang dan layaknya bersiap untuk perang. Pada saat Dewa Saraf dirawat di rumah sakit, beberapa anggota dari FPD dan Laskar Bali sempat hampir bentrok. Massa FPD menjaga, menjenguk Dewa Saraf, sedangkan massa dari Laskar Bali memastikan keadaan Dewa Saraf, menantangnya apakah akan melanjutkan masalah ini atau tidak. Di markas Laskar Bali, rumahnya Gung Alit di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, setiap malam di depan rumah pasti berjaga-jaga atau hanya berkumpul-kumpul sekelompok massa. Kabar burung yang beredar massa dari FPD sedang menyusun kekuatan dan menghubungi semua jaringannya untuk membalas penusukan terhadap Dewa Saraf.<sup>22</sup>

Laskar Bali akhirnya memenangkan perseteruan antar geng ini. Mereka masih tetap menguasai lahan di Akasaka diskotek dan beberapa tempat hiburan di wilayah Teuku Umar dan tentu saja di kawasan markas mereka, Jalan Imam Bonjol. Tercatat beberapa kafe-kafe, tempat hiburan, diskotik sepanjang wilayah ini memakai jasa pengamanan dari anggota Laskar Bali yang berasal dari *sekaa teruna* (organisasi pemuda) di *banjar* kawasan Jalan Imam Bonjol, Teuku Umar dan sekitarnya. Mereka biasanya akan dimanfaatkan untuk menjadi petugas keamanan ditempat-tempat kafe-kafe dan diskotek di kawasan Iman Bonjol, diantaranya diskotek Janger, Bengawan Solo dan beberapa kafe-kafe kecil. Di tempat-tempat hiburan inilah Laskar Bali menempatkan anggotanya dan mendapat perlakuan khusus dari pemilik diskotik atau kafe, selain tentunya diskotik dan kafe ini memberikan uang keamanan secara resmi kepada Laskar Bali.

Dalam Pemilu 2004 lalu, Laskar Bali memilih untuk menjadi tenaga pengamanan dalam kampanye-kampanye PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa)<sup>23</sup> pimpinan putri Soeharto, Mbak Tutut dan pensiunan Jendral R. Hartono. Kiblat organisasi massa ini mengarah ke PKPB tidak bisa dilepaskan dari sejarah terbentuknya Laskar Bali dan kedekatan dengan keluarga Cendana (Tommy Soeharto) dan Tomy Winata. Dalam setiap kampanye, pasukan Laskar Bali biasa

---

<sup>22</sup> Kejadian ini mendapat liputan pers (Juni-Juli 2002), namun tidak secara gamblang menyebutkan pertarungan kedua organisasi massa ini (FPD dan Laskar Bali) untuk memperebutkan pengaruh. Akhirnya ada semacam kesepakatan setelah selesainya “pertarungan” untuk membagi-bagi wilayah kekuasaan. FPD kembali ke habitatnya menguasai Terminal Ubung dan Laskar Bali menguasai keamanan di tempat-tempat hiburan malam di daerah Teuku Umar, Imam Bonjol hingga beberapa diskotik di Kuta.

<sup>23</sup> Catatan lapangan kampanye PKPB di Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar dalam Pemilu 2004. Anggota Laskar Bali menjadi satuan pengaman dalam pelaksanaan kampanye tersebut. Para *bodyguard* berbadan kekar ini menggunakan seragam kaos hitam bertuliskan “Laskar Bali Peduli Bangsa”.



mengenakan seragam kaos berwarna hitam dan coklat tua mirip kaos tentara bertuliskan “Laskar Bali Peduli Bangsa”. Badan para pengawalnya kekar-kekar hasil latihan dari banyaknya *fitness centre* dan *body building* yang tersebar sampai ke pelosok desa-desa di Bali. Politik kejantanan dan kekarnya tubuh menjadi *image* yang sangat berharga bagi para satuan pengamanan ini. Dengan badan yang kekar menjadi modal untuk membuat seram, gawat dan berwibawanya satuan pengamanan ini.

Kelompok organisasi massa yang lain, yang jauh terletak di utara Pulau Bali adalah **Garda Buleleng**. Garda Buleleng didirikan oleh Ketut Sadia, pensiunan polisi, di Buleleng awal tahun 2004. Organisasi massa terbesar di Buleleng ini didirikan atas kekecewaan Sadia terhadap Partai Golkar, tempatnya dulu bernaung. Kasus Sadia—yang menjadi aktor bom molotov di Desa Banyuning, 27 Oktober 2003 sebagai balas dendam tewasnya dua kader Golkar saat bentrok massa antara PDIP dan Golkar sebelumnya—akhirnya terlantar dan Sadia tidak dilindungi oleh DPD Golkar Bali

I Ketut Sadia nama lengkapnya, latar belakangnya adalah seorang pensiunan polisi yang kemudian menjadi pengusaha kafe. Sadia terkenal di Buleleng menguasai wilayah kota Singaraja. Sejarah perkelahiannya sebagai mantan polisi, membuatnya bergabung dengan dua tokoh lagi yang sangat terkenal di Buleleng sebagai penguasa “preman” di kota Singaraja. Keduanya adalah Budiasa alias Koming dan Malen.

Sadia setelah pensiun dan pulang dari bertugas sebagai polisi mendirikan usaha kafe. Disamping itu kegemarannya saat masih muda yaitu *tajen* (sabung ayam) diteruskannya. Kali ini, Sadia muncul sebagai orang kuat dan ia berhasil berhasil mengumpulkan massa dari arena *tajen-tajen* di kota Singaraja. Arena-arena *tajen* di Singaraja sangat banyak dan tempat berkumpulnya massa. Dan Sadia, sebagai seorang tokoh *tajen*, berhasil untuk menggalang kekuatan massa dari kelompok *tajen* dan penjudi ini. Sebagai seorang tokoh, saat Pemilu 1999, Sadia memilih untuk menjadi mesin politik Golkar. Karena pengaruh Sadia inilah, Golkar saat pemilu 1999 memperoleh suara signifikan dan mampu bersaing ketat dengan PDIP.

Saat kerusuhan di Desa Petandakan, bentok antara PDIP dan Golkar, Sadia berada di pihak Golkar dan menyimpan dendam atas tewasnya dua kader AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar)



Desa Petandakan, Putu Negara dan Ketut Agustana. Saat kerusuhan tersebut, satu mobil *hartop* Sadia hangus terbakar. Karena itulah, Ia bersama dengan Warika dan kader Golkar dari kelompok penjudi, tukang tajan, melakukan aksi balasan dengan menebar teror bom molotov di Desa Banyuning 27 Oktober 2003.<sup>24</sup>

Aksi balasan ini dilakukan Sadia untuk menunjukkan kelayalannya dengan Partai Golkar. Namun sayang, kelayalan Sadia dan massanya ini ditanggapi dingin oleh DPD Golkar Bali dan Buleleng. Sadia tidak dilindungi oleh Golkar dan dibiarkan berjuang sendirian tanpa bantuan DPD. Sadia kecewa dan memutuskan keluar dari Golkar. Setelah keluar inilah, Ia bersama kawan-kawan penjudi, tukang tajan dan lain-lain membentuk organisasi massa bernama Garda Buleleng.

Keluarnya Sadia dan massanya ini menggembosi suara Golkar dalam Pemilu 2004 lalu. Tercatat 11 anak ranting Golkar Buleleng mengikuti Sadia keluar dari Golkar dan bergabung dengan Garda Buleleng. Terbentuknya Garda Buleleng saat ini masih mengesankan diri independen. Terbentuknya Garda Buleleng mendapat restu dari Bupati Buleleng, Ketut Bagiada yang orang PDIP. Tapi Sadia dengan Garda Buleleng tetap berjalan independen.

Sebagai organisasi massa, saat pendeklarasiannya dihadiri oleh Bupati Buleleng yang langsung meresmikan organisasi massa ini sebagai penjaga Buleleng. Tercatat banyak tokoh-tokoh intelektual dan politisi Buleleng di Denpasar, yang menempati posisi strategis masuk menjadi penasehatnya. Garda Buleleng dalam kegiatannya selain menjadi mesin politik dan kekerasan juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Kegiatan sosial masyarakat yang pernah dilakukan Garda Buleleng adalah kerja bakti, gotong royong dan memberikan sumbangan-sumbangan sosial kepada korban bencana alam, panti asuhan dan kegiatan-kegiatan sosial dan politik di Buleleng.

Sebagai bentuk balas jasanya terhadap Bupati Buleleng, Ketut Bagiada, Garda Buleleng masuk dalam tim pembela Bupati Ketut Bagiada. Bagiada yang seorang bankir dan kader PDIP setelah Pemilu 5 Juli 2004 diserang legislatif terkait kasus caleg (calon anggota legislatif) yang kisruh di Buleleng. Posisi garda Buleleng kini memang tidak menegaskan dukungannya pada salah

---

<sup>24</sup> Catatan media massa yang menuliskan peristiwa kekerasan ini, Bali Post (28 dan 30/10/2003), Nusa (28 dan 30/10/2003) dan Radar Bali (31/10/2003).



satu partai atau kekuatan tertentu. Kehadirannya lebih sebagai unjuk kekuatan dari massa Sadia yang sudah bisa ditebak (golongan penjudi, *tajen* dll).<sup>25</sup>

Sementara dua kawan Sadia yang lainnya berjalan dengan kekuatannya sendiri, dengan identitasnya sendiri. Malen kini menjadi “penguasa”, tim keamanan, dari PLTGU Pamaron. Malen dan kelompoknya bertugas menjaga PLTGU yang didukung oleh Bupati Buleleng Ketut Bagiada, Pemerintah Daerah, Garda Buleleng. Sedangkan kelompok yang kontra adalah kelompok-kelompok pariwisata.

Sementara Budiasa (Koming) kini memiliki LSM bernama Forum Masyarakat Peduli Buleleng (FMPB). Kekuatan Budiasa ini adalah pada wilayah pasar-pasar tradisional di Buleleng. Ketua PD Pasar Buleleng, Artana adalah anggota dari FMPB dan memberikan tugas penjagaan keamanan kepada pasar-pasar di Buleleng kepada Budiasa (Koming) dengan massanya.

Sementara kelompok yang lain di luar kota Buleleng dikuasai oleh kelompok yang terkenal dengan nama KOKAR. Ini adalah singkatan dari trio “preman” Buleleng yang sangat terkenal dengan sejarah perkelahiannya dan pertarungan politiknya. **KOKAR, KOyan, KAjar dan Rama**. Koyan berasal dari Desa Sidetapa, Kajar berasal dari Desa Batusraga dan Rama berasal dari Desa Tejakula.

Nama besar KOKAR memang terkenal di zamannya. Massa ketiga sesepuh preman di Buleleng ini bisa mempengaruhi suara partai politik dalam Pemilu 2004 lalu. KOKAR terkenal sebagai petualang politik mulai dari Golkar saat orde baru, PDIP saat reformasi sampai 1999 dan kini kelompok mereka berafiliasi kepada PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa). Dengan dukungan dari massa kelompok KOKAR ini, PKPB berhasil memperoleh 6 kursi di DPRD Buleleng dan 2 kursi di DPRD Propinsi Bali. Ketiga anak dari KOKAR ini—sering disebut putra mahkota dari KOKAR—semuanya lolos menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Buleleng. Sebelum menjadi mesin politik PKPB, kelompok KOKAR sempat berafiliasi ke Partai Patriot Pancasila pimpinan dari Yapto, tokoh Pemuda Pancasila.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Catatan tentang Garda Buleleng dari hasil catatan lapangan dan wawancara di Kabupaten Buleleng, Oktober 2004.

<sup>26</sup> Studi awal tentang geneologi para jagoan di Buleleng, khususnya kelompok KOKAR pada Oktober 2004.



Di Kabupaten Karangasem terdapat organisasi **DPM (Dewan Perwakilan Massa)**. Daerah Karangasem terkenal dengan politik pengerahan massa dan kasus-kasus kekerasan massa adat dan penganiayaan karena tidak mematahui *awig-awig* (peraturan desa). Dalam deklarasinya di kota Amlapura, Kari Subali, ketua DPM, anggota DPRD Karangasem dari PDIP mengerahkan ribuan massa yang memenuhi pusat kota Karangasem itu. Sedangkan dalam gedung pertemuan, hadir pejabat teras pemerintahan, intelektual, dan tentu saja politisi seluruh Bali. Ada semacam pengakuan akan kekuatan organisasi ini. Berikutnya aksi DPM adalah membawa massa dengan puluhan truk ke Denpasar untuk menyatakan sikap membantu pembangunan di Karangasem dan menghakimi pejabat yang korup dan KKN.

Geneologi kelompok jagoan ini dalam catatan Henk Schultet Nordholt sudah ada sejak zaman kolonial, di mana terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan masyarakat desa seperti pencurian sapi, pemerasan, penyelundupan candu, kekerasan, dan terutama intimidasi sebagai fenomena sehari-hari. Pelaku-pelaku yang paling penting dalam hal ini adalah para jagoan. Istilah jagoan tidak hanya merujuk suatu kebudayaan yang menekankan maskulinitas, kejantanan, keahlian dalam berkelahi, dan kekuasaan yang diperoleh secara ‘magis’, melainkan juga suatu kategori baru ‘orang kuat’ lokal yang beroperasi di sisi kelam pemerintahan kolonial.

Pekerjaan mencuri milik lembaga-lembaga lokal yang menyediakan pekerjaan untuk banyak orang, dan untuk beberapa orang merupakan kesempatan untuk menanam modal, dan menawarkan keuntungan-keuntungan bagi para pelindung kelompok jagoan ini. Tak ada pemimpin desa yang menganggap desanya aman dan beres, jika ia tidak memelihara sekurang-sekurangnya seorang pencuri/maling atau biasanya beberapa orang yang bekerja di bawah komando maling tua dan bijaksana, yang disebut ‘jagoan’.

Bentuk kejahatan di pedesaan yang dilakukan oleh para jagoan ini ternyata tidak bisa ditampik oleh pemerintah kolonial. Kejahatan pedesaan ini terjadi sebagaimana besar terjadi karena ketidakmampuan institusi pemerintah resmi desa (khususnya di Jawa) dalam mengendalikan seluruh desa. Oleh karena itu mereka terpaksa mengerahkan para jagoan, dengan imbalan bebas menjalankan kegiatan kriminal mereka.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Henk Schulte Nordholt, *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*, Oktober 2002, hal. 10-11



Pengalaman kolonial memberikan pelajaran bahwa kejahatan, aksi-aksi kriminalitas dengan negara, pemerintahan, ternyata saling memperkuat. Negara mempunyai formasi dan sistem untuk menggerakkan pemerintahan, tapi seiring sistem dan formasi itu macet, muncullah kelompok-kelompok massa, milisi dan para jagoan ini untuk menawarkan jasa pengamanan “membantu” pemerintah. Negara dan kejahatan berelasi kuat dan menciptakan sebuah jaringan mafia kejahatan. Sungguh sulit membedakan mana kelompok jagoan, para milisi dengan “aparatus berwajib”.

Pada masa kini, masyarakat sering menyebutnya sebagai “preman”. Preman berasal dari kata ‘vrij-man’ yang berarti orang yang bebas dari kerja paksa. Arti ini kemudian berubah dari ‘prajurit berpakaian sipil’ serta ‘agen dalam samaran’ menjadi ‘perantara kekerasan politik’.<sup>28</sup> Dalam isitilah geneologi, preman adalah ‘cucunya’ jagoan. Dari jagoan, preman belajar ‘bisnisnya”

Contoh nyata itu terjadi di Bali, khususnya di Terminal Ubung, tempat basis kekuasaan dari Forum Peduli Denpasar (FPD). Di dalam terminal sebelumnya telah ada aparat pemerintah dari Departemen Perhubungan, DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya) dan Kepala Terminal yang mengurus operasi terminal dan segala halnya, termasuk di dalamnya para organisasi Bis, pedagang, sopir-sopir. Tapi Walikota Denpasar, AAN Puspayoga, merasa perlu memasukkan FPD sebagai salah satu pengelola “tidak resmi” dari terminal, yang menjadi jagoan dalam setiap masalah di terminal. Akhirnya FPD yang melakukan tugas memungut “uang keamanan” ke pedagang-pedagang di dalam terminal, membentuk koperasi para sopir dan pegawai terminal, yang secara informal berkuasa penuh dalam beroperasinya terminal. Semuanya harus atas seizin dari FPD.

Bergantinya kekuasaan juga mempengaruhi siapa “jagoan” yang terlibat. Sebelum PDIP dan AAN Puspayoga menjadi Walikota Denpasar, Terminal Ubung dikuasai oleh kelompok jagoan pencak silat bernama Bakti Negara yang berafiliasi ke Golkar, yang berkuasa penuh sebelum

---

<sup>28</sup> Loren Rytter, Nico Schulet Nordholt via Henk Sculte Nordholt, *op. cit.*





digulingkan PDIP dalam Pemilu 1999 di Bali. Pengambilalihan lahan Terminal Ubung juga langsung terjadi dari Bakti Negara ke FPD.<sup>29</sup>

Negara dan kejahatan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di dalamnya terdapat pertarungan memperebutkan akses dan keuntungan ekonomi politik yang tak terhindarkan. Dalam kasus Bali, munculnya kelompok massa para milisi dan jagoan ini saling menguatkan dengan negara, antar keduanya terdapat “hubungan manis”.

Salah satu faktor penting munculnya kelompok massa para jagoan ini adalah relasi penting dari Bali sebagai destinasi “surga pariwisata”. Pariwisatalah yang memungkinkan lahir beragam infrastruktur pendukungnya seperti diskotik, jaringan prostitusi, bisnis narkoba, *trafficking*, dan bentuk kriminalitas lainnya, disamping ideologi, wacana, dan cara berpikir manusia Bali. Pariwisata telah membentuk karakter manusia Bali untuk mencari celah dalam memanfaatkan (atau dimanfaatkan?) pariwisata. Industri ini membius perilaku dan politik kebudayaan manusia Bali.

Dari celah-celah gelap pariwisata itulah (pelacuran, hiburan malam, narkoba, dan lainnya) — bukan tarian Legong dan indahnya adat istiadat budaya Bali—manusia Bali mengais rejeki. Salah satu yang gampang, dan ini karena alasan sebagai penduduk asli/pribumi, “pemilik wilayah” daerah tersebut, adalah menawarkan industri jasa pengamanan di tempat usaha pariwisata itu beroperasi. Ini secara gamblang dilakukan, bahkan oleh institusi adat Desa Pakraman Kuta yang mengelola seluruh denyut nadi wisata di daerah Kuta, termasuk di dalamnya menyiapkan tenaga keamanan berpakaian adat Bali. Mereka adalah *pecalang pariwisata* yang berperilaku simpatik untuk memungut iuran jasa keamanan di daerah tersebut. Ini dilakukan oleh Desa Pakraman Kuta untuk menangkai masuknya pertarungan kelompok massa, para preman yang memperebutkan lahan di Kuta. Jadi, lebih baik institusi adat yang mengelolanya.

“Langkah cerdas” Desa Pakraman Kuta menjadi inspirasi desa-desa lain yang didaerahnya terdapat obyek lahan wisata, di mana jasa pengamanan bisa laku terpakai. Maka mulai ramailah desa-desa adat/pakraman di Bali menancapkan taringnya di setiap lahan basah wisata yang bisa mendatangkan pemasukan untuk kas desa.

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan beberapa sopir dan pedagang di Terminal Ubung, Januari 2005.



Ternyata, lembaga adat yang “atas nama kebudayaan” itu bisa menjadi organisasi jagoan dan preman untuk menjual jasa pengamanan di daerahnya masing-masing. Hadirnya *pecalang*, seperti diutarakan di bagian awal tulisan ini, yang melakukan “aksi premanisme legal” dengan memungut dana *jaga baya* (keamanan) di setiap toko di daerah kekuasaan desa adat, menunjukkan itu semua. Desa adat merasa berhak melakukan aksi ini karena segala macam pengelolaan pembangunan di desa menjadi wewenang mereka sendiri, termasuk menerapkan berbagai macam aturan-aturan atas nama kepentingan desa adat.

Nafas otonomi daerah menjadi peluang desa adat untuk mencari dana sebesar-besarnya untuk biaya pembangunan desa dan dana untuk ritual dan upacara keagamaan yang terus-menerus akan dihadapi. Dilema institusi adat ini kemudian dipecahkan dengan membidik setiap peluang-peluang untuk menghasilkan uang. Salah satunya adalah dengan melakukan razia penduduk pendatang dan sudah pasti dana *jaga baya* yang dilakukan oleh para *pecalang* dan jagoan-jagoan lokal yang menghimpun dirinya di bawah atap desa adat.

Organisasi massa dan kelompok preman ini kadang berbenturan dengan desa adat, sebagai kelompok massa jagoan lain, tapi kadang saling mengakomodasi. Organisasi massa menyadari bahwa mereka mencari makan di wilayah kekuasaan desa adat, maka wajiblah mereka memberikan “sumbangan” pada pembangunan desa adat. Hal ini terjadi di wilayah Desa Adat Ubung, tempat Terminal Ubung yang dikuasai oleh Forum Peduli Denpasar (FPD). Setiap bulannya, FPD memberikan “sumbangan” pada Desa Adat Ubung sebesar 3-4 juta.<sup>30</sup> Sementara negara hanya bisa menyaksikan pertarungan dan relasi antar keduanya, organisasi massa jagoan dan desa adat.

Ikut menjaga kebudayaan Bali adalah salah satu payung yang bisa menghimpun organisasi massa para jagoan ini dan desa adat untuk bersatu padu. “*Gerakan Rakyat Ajeg Bali*” adalah salah satu seruan untuk bersama-sama menjaga, mengokohkan, dan melestarikan kebudayaan Bali yang disambut antusias. Organisasi massa seperti FPD bahkan berani pasang badan untuk mendukung pemerintah kota Denpasar menertibkan penduduk yang menjadi sumber dari segala sumber masalah di kota Denpasar.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara November 2004.



Trio kuat para jagoan, organisasi massa (FPD, Laskar Bali, Garda Buleleng, KOKAR, DPM, bahkan yang lainnya), desa adat/pakraman, dan negara bertarung dalam pentas memperebutkan akses dan kekuasaan ekonomi politik hasil derasnya industri pariwisata menyerang Bali. Mereka saling bertarung, melenyapkan dan menyingkirkan, tapi pada satu kesempatan mereka bisa dipersatukan untuk bersama-sama menjaga Bali, karena inilah sumber penghidupan mereka, terjaganya keamanan Bali dan kehidupan ekonomi pariwisata kembali berdenyut. Hal lainnya, “budaya Bali yang adiluhung” harus tetap dijaga dan dipertahankan. Inilah modal penting Bali selama ini untuk menggaet image eksotis dan “berbudaya” yang diimpikan oleh para pelancong. Eksotik dan gemerlapnya pariwisata dan budaya Bali ternyata disokong oleh keras dan liciknya pertarungan para jagoan yang bisa tersenyum manis menanti gemerincing dollar.

### **Dendam dan Ingatan: Memecah Bungkam**

Budaya, politik, dan pariwisata ternyata tidak berpihak pada Nyoman Dangin dan I Wayan Kantun. Mereka adalah manusia Bali yang menjadi tersisih dan terhempas dalam gemerlap lampu-lampu diskotik dan perdagangan manusia untuk pelacuran di pulau seribu pura ini. Pada Nyoman Dangin dan Kantun, politik kebudayaan Bali berhutang bagaimana membongkar relasi budaya, kuasa dan pariwisata yang melahirkan politik kebudayaan Bali selama ini.

Lirihnya pengakuan Dangin dengan dendam dan ingatan kekerasan yang dibawanya sampai mati, atau pengakuan Kantun yang tersisih dan menjadi korban kekerasan massa adat, adalah ingatan dari sisi senyap dibalik gemerlap pariwisata dan pertunjukan *Barong Dance* di Bali. Mereka dan juga sebagian masyarakat Bali, memiliki ingatan yang tersisih, tersapu gelombang besar stabilitas keamanan dari ideologi “Pariwisata Budaya”. Ingatan-ingatan mereka, jika dituturkan dan diungkap, dianggap merusak citra Bali yang damai dan tenang tanpa konflik dan kekerasan.

Ingatan dan dendam Nyoman Dangin dan I Wayan Kantun memberikan kita cermin bagaimana ingatan mereka mendapat ruang untuk berbagi dan bertutur? Juga menelisik keengganan mereka mengingat pahit, getir dan pedihnya kehilangan dua orang anak dan menjadi musuh dari masyarakat adat.



Selama ini, teks-teks yang lahir adalah tentang strategi pembangunan pariwisata budaya Bali, tantangan dan hambatan atau yang sejenisnya. Tapi, sama sekali tidak ada dalam pikiran kita bagaimana beroperasinya ideologi (pariwisata, kuasa, pembangunan, budaya, adat, politik dan para jagoan) dapat menimbulkan akibat bagi kehidupan orang biasa, seperti Nyoman Daging dan I Wayan Kantun? Bagaimana makna budaya dan pariwisata sesungguhnya bagi mereka?

Pada cerita merekalah kita menemukan “sisi bawah” dari kesenyapan manusia Bali di daerahnya sendiri, yang di dalamnya terdapat perasaan tersisih, emosi, kepedihan dan kesengsaraan, trauma, rasa kehilangan, kesenyapan-kesenyapan yang tersimpan pada ingatan manusia Bali yang tersisih ini.<sup>31</sup>

Tragedi pembantaian “manusia merah” di Bali 1965-1966 adalah jejak yang tertinggal dari keengganan manusia Bali mengingat masa lalu yang pedih. Keengganan mengingat itu karena ketakutan dicap sebagai “pencemar” budaya Bali atau “musuh pembangunan”. Tapi kini, apapun alasannya, manusia Bali harus memecah kesenyapannya, menuturkan semua ingatan dan kepedihan yang telah lama bungkam oleh bujuk rayu mahluk manis pembunuh bernama keutuhan budaya dan pariwisata.

**Denpasar dan Yogyakarta, 9 Juli 2005**

---

<sup>31</sup>Terinspirasi dari karya yang sangat menggugah, Urvashi Butalia, *Sisi Balik Senyap, The Other Side of Silence*, Agustus 2002.



## Daftar Pustaka

- Adam, Asvi Warman, 2004, *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, Yogyakarta Penerbit Ombak.
- Bagus, Prof. DR. I Gusti Ngurah, 2004, *Mengkritisi Peradaban Hegemonik*, Denpasar, Kajian Budaya Universitas Udayana Books.
- Bali Post, *Ajeg Bali Sebuah Cita-Cita*, 2004, Denpasar, Bali Post.
- Butalia, Urvashi, 2002, *Sisi Balik Senyap, The Other Side of Silence*, Yogyakarta, Indonesia Tera.
- Crouch, Harold, 1999, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Cribb, Robert (editor), 2003, *The Indonesian Killings, Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, Yogyakarta, MataBangsa.
- Cribb, Robert, Soe Hok Gie dkk, 2003, *BALI*, dalam Cribb, Robert (editor), 2003, *The Indonesian Killings, Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, Yogyakarta, MataBangsa.
- Eklof, Stefan, *Pembunuhan-Pembunuhan di Bali 1965-1966: Pendekatan Historis dan Budaya*, 2003, dalam Frank Huskeen, Huub de Jonge (eds), *Orde Zonder Order (Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998)*, Yogyakarta, Penerbit LKiS, hlm 181-221.
- Geertz, Clifford, 2000, *Negara Teater*, Yogyakarta, Penerbit Bentang Budaya.
- Gie, Soe Hok, 1995, *Zaman Peralihan*, Yogyakarta, Penerbit Bentang Budaya.
- Huskeen, Huub de Jonge (eds), 2003, *Orde Zonder Order (Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998)*, Yogyakarta, Penerbit LKiS.
- ISAI, Tim, 2000, *Premanisme Politik*, Jakarta, ISAI.
- Nordholt, Henk Schulte, 2002, *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Robinson, Geoffery, 1995, *The Dark Side Of Paradise, Political Violence in Bali*, Cornell University Press.
- Santikarma, Degung, 2000, *Kisah Bali dengan Keakraban dalam Kekerasan*, dalam Kompas 1 September 2000.
- , Degung, 2002, *Budaya Siaga dan Siaga Budaya*, dalam Kompas Minggu 6 November 2002.
- , 2003, *Monumen, Dokumen, dan Kekerasan Massal*, dalam Kompas 1 Agustus 2003.



Siegel, James T, 2000, *Penjahat Gaya (Orde) Baru, Eksplorasi Politik dan Kriminalitas*, Yogyakarta, LKiS.

Suryawan, Ngurah, 2002, *Pecalang dan Penjaga Kebudayaan Bali*, Kompas 22 Oktober 2002.

-----, Ngurah, 2004, *Ajag Bali dan Lahirnya Jago-jago Kebudayaan*, Kompas, 1 April 2004.

-----, Ngurah, 2005, *Pecalang Politik dan Para Milisi*, Kompas, 17 April 2005.

-----, Ngurah, 2005, *Bali, Narasi Dalam Kuasa (Politik dan Kekerasan di Bali)*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.

### **Koran, Jurnal dan Majalah**

SARAD, Majalah Gumi Bali, *Pecalang Pulanglah*, No. 31 Oktober 2002.

SARAD, Majalah Gumi Bali, *Sudahi Kelahi Sesami Bali*, No. 44 Desember 2003.

SARAD, Majalah Gumi Bali, *Saat Kekerasan Menjadi Panglima*, No. 24 Maret 2002.

SARAD, Majalah Gumi Bali, *Ricuh Bali di Hari Suci*, No. 60 April 2005.

Bali Post, 21 November 2002.

Bali Post, 22 November 2002.

Bali Post, 23 November 2002.

Bali Post, 24 November 2002.

Bali Post, 25 November 2002.

Bali Post, 27 Oktober 2003.

Bali Post, 28 Oktober 2003.

Bali Post, 30 Oktober 2003.

Kompas, 30 Oktober 2003.

Kompas, 8 November 2003.

Nusa, 26 Oktober 2003.

Nusa, 28 Oktober 2003.

Nusa, 30 Oktober 2003.

Radar Bali, 31 Oktober 2003

